



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab. Pidie Jaya, Cot Trieng, Meureudu Kode Pos 24186

Telepon. 0653-51292, Faksimile. 0653-51292

Laman : www.pidiejaya.go.id, Pos-el : setdakab@pidiejaya.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Pidie Jaya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Pidie Jaya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Bupati Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan usulan SKPK/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2026.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan Rancangan Peraturan Bupati Pidie Jaya meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Bupati Pidie Jaya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepada SKPK/Unit Kerja pengusul Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati, agar segera mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Bupati berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, serta dapat melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya jika dipandang perlu.
- KELIMA : Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana diktum Keempat dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan/mekanisme pembentukan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 9 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN


MUNAWAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Pidie Jaya;
3. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya; dan
5. Para Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2026

SKPK	TENTANG	STATUS			DASAR HUKUM	KETERANGAN
		BARU	PERUBAHAN	PENGgantian		
1	2	3	4	5	6	7
BAGIAN PEMERINTAHAN	Kerja Sama Daerah	√			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	
	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2030	√			Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	
	Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua dengan Gampong Geunteng Kecamatan Meurah Dua dalam Kabupaten Pidie Jaya	√			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
	Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua dengan Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Dalam Kabupaten Pidie Jaya	√				
	Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua dengan Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu dalam Kabupaten Pidie Jaya	√				
	Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Gampong Geunteng Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya	√				
	Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya	√				
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kontigensi Banjir Kabupaten Pidie Jaya	√			Dokumen Kontigensi Banjir Pidie Jaya	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2027	√			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan	
	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2025	√			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
	Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2027	√			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
	Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2029	√				
	Formulasi Indikator Kinerja Pembangunan Pidie Jaya Tahun 2025-2029	√				

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2026	√			Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2026	√			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan	
	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2023-2028	√			Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Pidie Jaya		√		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	Pengelolaan Pasar	√			Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten	
DINAS PERTANAHAN	Zona Nilai Tanah	√			Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyelenggaraan Perpustakaan	√			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	
					Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	
					Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kab/Kot	
	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	√			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	√			Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
	Penerapan Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	√			Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	
	Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	√				
	Mutasi dan Promosi	√			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
					Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	
	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	√			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	
	Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan	√			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	
	Manajemen Talenta	√			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	

BAGIAN ORGANISASI	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana			√	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum			√	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	
	Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	√			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			√	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional	
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan			√	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota	
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			√	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif	
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu		√		Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah	
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√				
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan		√			
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Perternakan			√		
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup			√		
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan			√		
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			√		
	Roadmap Reformasi Birokrasi		√			
	Peta Jabatan	√			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	
	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		√		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	
	Budaya Kerja	√			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja	
	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	√			Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	
	Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Pidie Jaya	√				
	Penyetaraan Jabatan Struktural Ke Fungsional		√		Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan	√			Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten	
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	Penetapan Pembagian Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Pidie Jaya	√				
	Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Pidie Jaya	√			Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis	
BAGIAN KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyaluran Bantuan Tunai Kabupaten Pidie Jaya	√				
DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dalam Kabupaten Pidie Jaya	√			Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten	
	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dalam Kabupaten Pidie Jaya	√				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik Dalam Kabupaten Pidie Jaya		√			
	Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong		√		Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama	
	Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2026					
	Sistem Informasi Gampong	√			Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong	
	Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong	√			Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat	
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Tata Cara Pengelolaan Objek Wisata Di Lingkungan Objek Wisata/Sarana Wisata Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	√				
	Pembentukan dan Pemberdayaan Desa Wisata	√				
	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	√			Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	Tata Cara dan Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah	√				
	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026	√			Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten	
	Tata Cara Perhitungan Besaran Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah	√				
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA	Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya	√			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit	
	Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya		√			
	Pemanfaatan Dana Program Non Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya	√				
	Standar Harga Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya	√			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	
	Pedoman Pengelolaan Poliklinik Eksekutif Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya	√			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit	
	Pedoman Pengelolaan Utang Piutang Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya	√			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	
	Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya	√				
	Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya					
	Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya	√				
	Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya		√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	
SEKRETARIAT MAL	BAITUL Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah dan Harta Keagamaannya Lainnya Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya	√				

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN,


MUNAWAR